

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Auditing

*Auditing* merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh sekaligus mengevaluasi bukti objektif mengenai pernyataan-pernyataan kegiatan perusahaan dan kejadian ekonomi untuk menetapkan kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan pendapat (opini) kepada pemangku kepentingan.<sup>15</sup>

*Auditing* didefinisikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Akuntan Publik secara kritis dan terstruktur atas laporan keuangan yang dibuat kliennya (perusahaan) beserta catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya, untuk tujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.<sup>16</sup>

*Auditing* adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti informasi secara objektif yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, dengan tujuan untuk menyampaikan derajat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan bahwa *Auditing* merupakan suatu proses

---

<sup>15</sup> Mulyadi, *Auditing* –edisi 6..., hal.9

<sup>16</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik – Edisi 4 Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 4

<sup>17</sup> Alvin A. Arens, *et. al.*, *Auditing dan Jasa Asuransi: Pendekatan Terintegrasi – Edisi Kelimabelas Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 2.

pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal melalui bukti-bukti yang objektif untuk memberikan pendapatnya (opini audit) kepada pihak berkepentingan atas kewajaran informasi keuangan klien (perusahaan).

### **1. Jenis dan Pentingnya Audit**

Umumnya Akuntan Publik (Auditor Eksternal) melaksanakan tiga jenis audit atas informasi perusahaan yang sedang diaudit yang meliputi:

- a. **Audit Operasional** merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan Auditor untuk mengevaluasi prosedur dan metode dari setiap bagian operasional organisasi secara efektif dan efisien.
- b. **Audit Ketaatan** merupakan jenis audit yang pelaksanaannya berdasarkan pada aturan, di mana perusahaan yang diaudit apakah telah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
- c. **Audit Laporan Keuangan** merupakan jenis audit yang tujuannya untuk mengidentifikasi apakah laporan keuangan terdapat salah saji yang material dan memberi pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan audit laporan keuangan, tentunya sangat penting bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), di

---

<sup>18</sup> Arens, et. al., *Auditing dan Jasa Asurance: Pendekatan Terintegrasi...*, hlm. 12-15.

mana manajemen perusahaan dimintai pertanggungjawaban kepada pemegang saham atas laporan keuangannya pada saat agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di setiap tahunnya. Atas dasar tersebut, laporan keuangan yang disajikan manajemen penting untuk diaudit oleh Auditor, dikarenakan:

- a. Bila laporan keuangan tidak diaudit, ada kemungkinan mengandung unsur kesalahan maupun kecurangan. Sehingga pihak berkepentingan memiliki rasa kurang percaya terhadap kewajaran laporan keuangan yang tidak diaudit tersebut.
- b. Bila laporan keuangan yang diaudit memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) dari Auditor, maka pengguna laporan keuangan merasa yakin bahwa laporan keuangan perusahaan tidak terjadi salah saji yang material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. Sejak tahun 2001 perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp 25 miliar harus mencantumkan *audited financial statements* ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian.
- d. Perusahaan yang telah *go public* juga berkewajiban mencantumkan *audited financial statements* ke Bapepam-LK selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun buku.

Pihak pajak lebih mempercayai SPT (Surat Pemberitahuan) yang didukung adanya *audited financial statements* daripada laporan keuangan yang tidak diaudit.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing: Petunjuk Praktis...*, hlm. 10.

## B. Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut COSO adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris perusahaan, manajemen, dan personil lainnya, diterapkan dalam strategi yang meliputi keseluruhan perusahaan, yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mungkin mempengaruhi organisasi dan mengelola perusahaan sesuai dengan Risk Appetite perusahaan untuk menyediakan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan perusahaan.<sup>20</sup>

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian suatu perusahaan maupun organisasi. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal.<sup>21</sup> Pengendalian internal menurut laporan COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commisision*) merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang menandai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.<sup>22</sup>

System pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan

---

<sup>20</sup> [https://itjen.pu.go.id/single\\_kolom/27](https://itjen.pu.go.id/single_kolom/27) (diakses pada tanggal 09 Oktober 2021, pukul 10.00)

<sup>21</sup> Sulaeman, "Analisis Prosedur Pengendalian Intern Piutang Usaha pada Astra Credit Companies Cabang Makasar" (Makasar: Skripsi tidak Diterbitkan, 2012), hal 14

<sup>22</sup> Arum Ardianingsih, "Audit laoran Keuangan, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2018), hal 40

organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.<sup>23</sup>

Penegndalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalanya organisasi serta mendorong kesesuaian dan kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Menurut perturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tetang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa: system pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. System pengendalian internal yang diselenggarakan yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintaham Daerah.<sup>25</sup>

## 1. Tujuan Pengendalian Internal

Pada sistem pengendalian internal ada beberapa tujuan:<sup>26</sup>

- a. Untuk menjamin kebenaran akuntansi

---

<sup>23</sup> Mulyadi, *system Akuntans*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 163.

<sup>24</sup> Romney Marshall B. dan Steinbart, Paul Jhon, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal 229

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah daerah Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

<sup>26</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Struktur Pengendalian Internal* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta,1995), hal 2

Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan.

- b. Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya  
Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak sengaja. Hal yang sama juga berlaku untuk harta perusahaan yang tidak nyata seperti perkiraan piutang, dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Sistem pengendalian internal dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

- c. Untuk menggalakkan efisiensi usaha

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien.

- d. Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem pengendalian internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

## **2. Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal**

Agar dapat mencapai tujuan dari pengendalian sistem

akuntansi, suatu sistem harus memenuhi enam prinsip dasar pengendalian internal. Adapun prinsip dasar pengendalian internal tersebut meliputi:

a. Pemisahan Fungsi

Tujuan utama pemisahan fungsi yakni untuk menghindari dan mengawasi secepatnya atas kesalahan atau ketidakberesan. Adanya pemisahan fungsi untuk dapat mencapai suatu efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

b. Prosedur Pemberian Wewenang

Tujuan prinsip ini yakni untuk menjamin bahwa transaksi telah diotorisasi oleh orang yang berwenang.

c. Prosedur Dokumentasi

Dokumen yang layak, penting guna menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi.

d. Prosedur dan Pencatatan Akuntansi

Tujuan dari pengendalian ini yakni agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang kemudian dapat diteliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakannya tepat pada waktunya.

e. Pengawasan Fisik

Berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanisme dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi.

f. Pemeriksaan Internal Secara Bebas

Menyangkut perbandingan antara catatan aset yang betul- betul ada,menyelenggarakan rekening- rekening control.<sup>27</sup>

### 3. Komponen Pengendalian Internal

Pengendalian Internal, terdiri atas lima komponen yang diantaranya sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian diciptakan pimpinan instansi guna untuk penegakan integritas dan nilai etika, yang intinya kejujuran atas tindakan dan ucapan merupakan cerminan dari etika dasar.

b. Penilaian resiko

Penilaian resiko dilakukan dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah yang mencakup tujuan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan.<sup>28</sup>

c. Kegiatan pengendalian

Dalam menerapkan pengendalian diatur dalam pasal 16 ayat 2 PP Nomor 60 Tahun 2008, memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kegiatan inti dari Instansi Pemerintah
- 2) Kegiatan harus dikaitkan dengan proses penilaian resiko
- 3) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis
- 4) Kegiatan penendalian harus dievaluasi secara teratur

d. Informassi dan Komunikasi

---

<sup>27</sup> Theodorus M.Tuanakotta, *Audit Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal.95

<sup>28</sup>Ibid, hal.95-109

Menurut Pasal 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 Informasi dan komunikasi wajib diselenggarakan dengan efektif. Agar terselenggarakan dengan efektif maka pimpinan instansi harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola dan mengembangkan system informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan system pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 PP Nomor 60 Tahun 2008 ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tidak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.<sup>29</sup>

### C. Piutang

Piutang merupakan pendapatan yang masih utang atau belum dibayar oleh pihak konsumen. Sesuatu entitas telah melakukan jasa ataupun menjual barang akan tetapi konsumen belum membayar atas jasa ataupun barang yang telah kita berikan, hal tersebut bisa dikatakan sebagai piutang. Piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang daganga secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara kredit atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya.<sup>30</sup>

Pengertian piutang menurut Syamsudin piutang meliputi semua transaksi-transaksi pembelian secara kredit tetapi tidak membutuhkan

---

<sup>29</sup> PP Nomor 60 Tahun 2008

<sup>30</sup> Syamsyusin, *Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep aplikasi dalam Perencanaan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hal.252

suatu bentuk catatan atau surat formal yang ditandatangani yang menyatakan kewajiban kepada pihak penjual.<sup>31</sup>

Pengertian piutang menurut Munawir merupakan piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan dagang secara kredit.<sup>32</sup>

### **1. Jenis- Jenis Piutang**

Sebelum transaksi penjualan dilakukan, biasanya terlebih dahulu ada kesepakatan mengenai cara pembayaran transaksi tersebut apakah secara tunai atau kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara kredit maka perusahaan akan menerima piutang. Pengklasifikasikan piutang dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi yang mempengaruhinya.<sup>33</sup>

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengemukakan bahwa menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan menjadi dua kategori yaitu: piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha timbul karena penjualan produk atau jasa dalam rangka kegiatan normal usaha, sementara piutang yang timbul diluar kegiatan normal usaha digolongkan sebagai piutang lain-lain. Berikut adalah pengelompokan piutang secara umum:<sup>34</sup>

#### **a. Piutang Dagang**

Piutang dagang merakan jumlah tagihan perusahaan kepada

---

<sup>31</sup> Ibid, hal.252

<sup>32</sup> Munawir S., *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal.15

<sup>33</sup> Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal.451

<sup>34</sup> Ibid, hal.451

pelanggan yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang dagang merupakan piutang yang paling lazim ditemukan dan umumnya mempunyai jumlah yang paling besar. Piutang ini dapat dibagi menjadi piutang usaha dan wesel tagih.

1) Piutang usaha

Piutang usaha yang berasal dari penjualan kredit jangka pendek dan biasanya dapat tertagih dalam waktu 30- sampai 60 hari. Biasanya piutang usaha tidak melibatkan bunga, meskipun pembayaran bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayarannya tidak dilakukan dalam periode tertentu.

2) Wesel tagih

Wesel tagih adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu dimasa depan. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembayaran atau transaksi lainnya. Wesel tagih bisa bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel tagih dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Wesel tagih berbunga

Wesel tagih berbunga ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal dan ditambah dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus.

b) Wesel tagih tanpa bunga

Pada wesel tagih tanpa bunga tidak dicantumkan persen

bunga, tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga.

b. Piutang Lain-lain (Non Dagang)

Piutang lain-lain merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pihak lain akibat dari transaksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kegiatan normal usaha perusahaan. Piutang lain-lain meliputi piutang pegawai, piutang dari perusahaan afiliasi, piutang dividen, piutang bunga, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Menurut Kieso, piutang dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Pitang Lancar

Piutang lancar merupakan piutang yang akan ditagih dalam masa satu tahun atau selama satu siklus operasi berjalan, mana yang lebih panjang.

b. Pitang tidak lancar

Piutang tidak lancar merupakan piutang yang akan tertagih lebih dari satu tahun.<sup>36</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Piutang

Menurut Sutrisno, ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi pada piutang yaitu:

a. Besarnya volume kredit

Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan akan ikut menentukan besar kecilnya investasi pada piutang.

b. Syarat pembayaran

Syarat pembayayaran merupakan salah satu informasi berkaitan

---

<sup>35</sup> Ibid, hal 451-452

<sup>36</sup>Donald E. Keiso, Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield, *Akuntansi intermediate*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 346

berakhirnya jatuh tempo piutang yang harus dibayar kepada pelanggan/debitur.

c. Plafon kredit

Plafon kredit ini menggambarkan jumlah kredit seberapa besarnya kredit yang akan diberikan kepada pelanggan.

d. Kebiasaan pembayaran pelanggan

Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit mundur dan waktu yang dipersyaratkan maka besarnya jumlah piutang semakin besar.

e. Kebijakan dalam pengumpulan piutang

Pengumpulan piutang merupakan elemen sangat penting untuk pengelolaan piutang, karena pengumpulan piutang ini merupakan tagihan kepada pelanggan jika pelanggan sedang jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh perusahaan.<sup>37</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang, sebagai berikut:

a. Volume penjualan kredit

Semakin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Dengan demikian maka besar volume penjualan kredit setiap tahunnya berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besar jumlah piutang berarti makin besar resiko tidak tertagihnya piutang, tetapi bersamaan

---

<sup>37</sup> Sutrisno, *MANajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 55

dengan itu juga memperbesar profitabilitasnya.

b. Syarat pembayaran penjualan kredit

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dari pertimbangan profitabilitasnya. Cara pembayaran lebih ketat misalnya dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat.

c. Ketentuan tentang pembatasan kredit

Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal kredit yang diberikan kepada para pelanggannya. Makin tinggi batas maksimal kredit yang ditetapkan bagi masing-masing langganannya, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. ketentuan dapat bersifat kuantitatif berupa batas maksimum kredit, dan dapat juga bersifat kualitatif berupa ketentuan mengenai Siapa yang dapat diberi kredit.

d. Kebijakan dalam pengumpulan piutang

Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Perusahaan yang melakukan kebijakan secara aktif, maka perusahaan harus mengeluarkan yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang, tetapi dengan menggunakan cara ini, maka piutang yang ada akan cepat tertagih sehingga akan lebih memperkecil Jumlah piutang

perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan menggunakan kebijaksanaan secara pasif, maka pengumpulan piutang akan lebih lama, sehingga Jumlah piutang perusahaan akan lebih besar.

e. Kebiasaan membayar dari para langganan

Langganan yang memiliki kebiasaan membayar dengan memanfaatkan cash discount bisa mengakibatkan semakin kecilnya investasi dalam piutang dibandingkan dengan yang tidak memanfaatkannya.

f. Manfaat penjualan secara kredit

Investasi pada piutang akan memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain kenaikan omset penjualan, kenaikan laba bersih, dan bertambahnya Market Share yang mana memberikan dampak positif bagi persaingan bisnis. Manfaat penjualan kredit antara lain: upaya untuk meningkatkan omset penjualan, meningkatkan keuntungan, meningkatkan hubungan dagang antara perusahaan dengan pelanggannya, manfaat keuntungan berupa selisih bunga modal pinjaman yang harus dibayarkan kepada bank sebagai sumber dana pembelanjaan piutang.<sup>38</sup>

### 3. Prosedur pencatatan Piutang

Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Dalam akuntansi piutang, secara

---

<sup>38</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 85-87

periodik dihasilkan pernyataan piutang yang dikirimkan kepada setiap debitur. Pernyataan piutang ini merupakan unsur Pengendalian internal yang baik dalam pencatatan piutang. Dokumen pokok yang diperlukan sebagai asas pencatatan adalah:

a. Faktur penjualan

Dalam neraca piutang, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya transaksi piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen tersebut dilampirkan dengan surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat transaksi penjualan kredit.

b. Bukti kas masuk

Dalam pencatatan piutang, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan oleh debitur.

c. Memo kredit

Dalam pencatatan piutang, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian penjualan, dan jika dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang disebut oleh bagian penerimaan barang, merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan.

d. Bukti Memorial

Bukti Memorial merupakan sumber untuk dasar pencatatan transaksi kedalam jurnal umum. Dokumen ini digunakan sebagai

dasar pencatatan penghapusan piutang.<sup>39</sup>

#### 4. Metode pencatatan piutang

Metode pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut:

a. Metode konvensional

Pada metode ini, Posting ke dalam kartu piutang dilakukan atas dasar data yang dicatat ke jurnal. Transaksi yang mempengaruhi piutang adalah transaksi penerimaan kas piutang, transaksi penjualan kredit, dan transaksi penghapusan piutang.

b. Metode posting langsung

Metode posting langsung ke dalam kartu piutang yang dibagi menjadi dua golongan yaitu metode posting harian dan posting periodik.

c. Metode pencatatan tanpa buku pembantu

Dalam metode pencatatan piutang tersebut, tidak digunakan buku pembantu piutang. Faktur penjualan serta bukti pendukung lainnya yang diterima dari bagian penagihan, oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum dibayar. Arsip faktur ini memiliki fungsi sebagai pencatatan piutang.<sup>40</sup>

#### D. Pengakuan piutang

Pengakuan atau pencatatan akan adanya piutang yang timbul dari kejadian transaksi-transaksi penjualan secara kredit berkaitan erat dengan

---

<sup>39</sup> Dwi Martini, Sylvia Veronica Nps, Ratna Wardhani, aria Faramita, Edward Tanuja, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Edisi Dua*, (Jakarta: salemba Empat, 2016), hal.42

<sup>40</sup> Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.43

adanya prinsip pengakuan pendapatan. Hasil penjualan dan piutang dagang sebagai pendapatan tersebut harus dicatat pada saat terjadi penjualan. Piutang timbul akibat adanya penyerahan jasa secara kredit dan transaksi penjualan secara kredit dan diakui dengan cara mendebit pada rekening piutang dagang lalu mengkredit pendapatan jasa atau rekening penjualan. Pada prinsipnya piutang dagang mengacu pada prinsip pendapatan dan piutang dagang harus diakui pada saat yang sama dengan pengakuan hasil penjualan kredit.<sup>41</sup>

Dalam sebagian besar transaksi piutang, jumlah yang harus diakui adalah pertukaran yang terjadi di antara 2 belah pihak. Harga pertukaran (*the exchange* adalah jumlah yang terutang dari debitur). 2 faktor yang bisa mempengaruhi pengukuran harga pertukaran:

1. Ketersediaan diskon
2. Lamanya antara tanggal penjualan dan tanggal jatuh tempo

Sedangkan menurut SAK ETAP paragraf 2.24, mengatakan pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laba rugi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Warren 2008 hal 44

<sup>42</sup> Ibid, hal 46

## E. Piutang koperasi

Menurut peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUMKM/VII/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi, piutang terdiri dari beberapa jenis yaitu:

### 1. Piutang usaha

Adalah tagihan piutang usaha adalah tagihan koperasi sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain yang tidak dibayar secara tunai.

### 2. Piutang pinjaman anggota

Adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai atau kredit berupa barang ataupun jasa) kepada anggota.

### 3. Piutang pinjaman non anggota

Piutang pinjaman non anggota adalah tagihan koperasi sebagai akibat transaksi pemberian pinjaman (tunai atau kredit berupa barang ataupun jasa) kepada non anggota.

### 4. Penyisihan piutang tak tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah penyisihan nilai tertentu, sebagai “pengurangan nilai nominal” piutang pinjaman atas terjadinya kemungkinan resiko piutang tak tertagih, yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pemberian piutang pinjaman.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUMKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

## F. Koperasi

### 1. Pengertian

Koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bagi masyarakat Indonesia, koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah koperasi yang berasal dari bahasa Inggris "*Cooperation*" terdiri dari dua suku kata yaitu *Co* yang berarti bersama dan *Operation* yang berarti bekerja. Jadi koperasi berarti bekerjasama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.<sup>44</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya.<sup>45</sup>

Menurut istilah, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi

---

hal 7 <sup>44</sup> Yenni Patriani Yakub, "*Sejahtera dengan Koperasi*", (Jakarta: PT Wadiah Ilmu 2012),

<sup>45</sup> Sudarsono, *MANajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 30

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperassi yang menjadi anggota koperassi yang memiliki lingkup lebih luas.<sup>47</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa koperaasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rayat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan, atau agama orang itu,

---

<sup>46</sup> Yenni Patriani Yakub, "*Sejahtera dengan Koperasi*", (Jakarta: PT wadah Ilmu 2012), hal 7

<sup>47</sup> Ibid, hal 7

<sup>48</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007 hal 1

dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>49</sup>

## 2. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.<sup>50</sup>

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

---

<sup>49</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002) hal 4

<sup>50</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribufif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, ( Jakarta: Rajawaali Pers, 2009) hal 245

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>51</sup>

Tujuan koperasi data pula ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.
- 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningatan tabungan.
  - 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
  - 3) Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkatkan sifat demokrasi dan mendidik anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam usaha.
- b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah melaksanakan undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendeokrasi ekonomi).

---

<sup>51</sup> Ibid, hal 245

- 1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  - 2) Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia.
- c. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan masyarakat.
- 1) Mengembaliakn kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
  - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi
  - 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi
  - 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, perternakan, keraajinan industry kecil, dan sebagainya.<sup>52</sup>

### 3. Landasan Hukum Koperasi

koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertensu, landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh dan serta berkembang dalam pelakssanaan usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya.

Landasan-landasan koperasi terbagi 3 yaitu:

- a. Landasan idiil koperasi Indonesia, merupakan dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha unutk mencapai cita-cita koperasi. Adapun landasan idiil Negara republic Indonesia yaitu Pancasila.

---

<sup>52</sup> Machfudz, Saelany dkk, *berpikir Besar dalam Koperasi*, (Pekalongan: Perintis Jasa Grafika, 2010), hal 41

- b. Landasan structural dan Gerak Koperasi Indonesia, merupakan tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup masyarakat. Landasan strukturil koperassi adalah undang-undang dasar 1945 sedangkan pasal 33 ayat (1) merupakan landasan gerak koperasi artinya agar ketentuan-ketentuan terperinci tentang koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dan jiwa pasal 33 ayat (1) undang-undang dasar 1945.
- c. Landasan mental koperasi Indonesia, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi.<sup>53</sup>

#### 4. Prinsip Tata Kelola Koperasi

Undang-undang No.25 tahun 1992 Bab III Pasal lima fungsi, peranan dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. Pendidikan
- g. Kerjasama antar koperasi<sup>54</sup>

Adapun penjelasan dari kutipan Undaang-undang No. 25 tahun 1992 diatas adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *dinamika Koperassi* (Jakarta: Reniak Cipta, 2007) hal 12

<sup>54</sup> Juhaya. S.Pradja, *Ekonomi Syari.ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hal 166

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa terhadap modal yang dibrikan kepada anggota terbatas dan tidak berdasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar.
- e. Kemandirian, dalam pengelolaan koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.
- f. Pendidikan, koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga

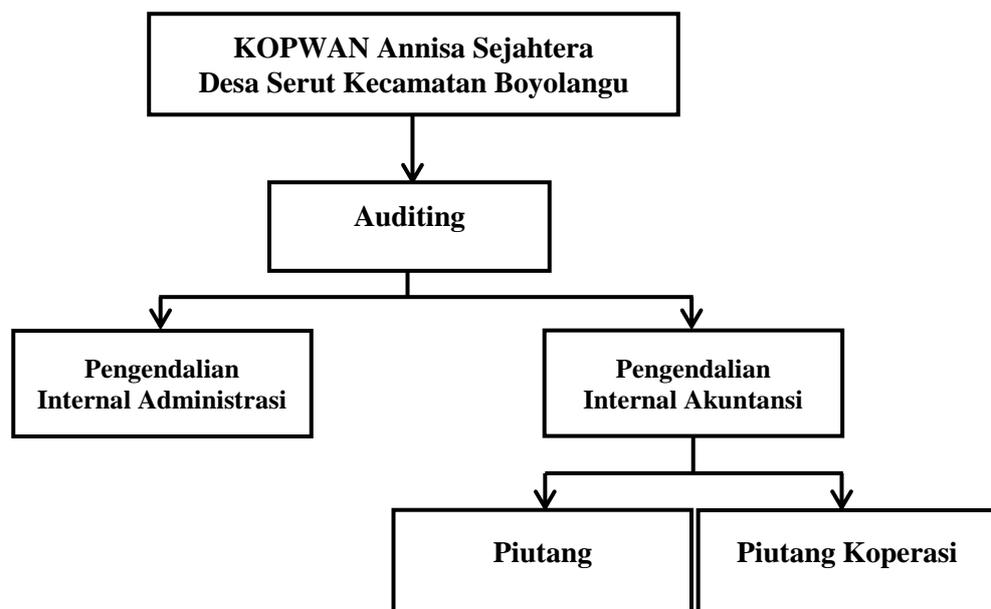
mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.

- g. Kerjasama antar koperasi. Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.<sup>55</sup>

### G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

#### Kerangka Konseptual



*Sumber: Data diolah peneliti 2020*

#### Keterangan:

Penelitian ini membahas mengenai penerapan pengendalian internal piutang dan piutang koperasi. Pengendalian Internal atas piutang pada KOPWAN Annisa Sejahtera dengan berpedoman

<sup>55</sup> Ibid. hal 166

pada COSO (*Committee Of Sponsoring Organizations Of the Treadway Commisision*) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian internal yaitu dengan menganalisis keefektifan penerapan pengendalian Internal atas Piutang pada KOPWAN Annisa Sejahtera Desa Serut Kecamatan Boyolangu.

## H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berhubungan dengan pengambilan tema dari “Analisis Pengendalian Internal atas Piutang Usaha untuk Mengurangi Resiko kredit Macet pada Koperasi Wanita Annisa Sejahtera Desa Serut Kecaatan Boyolangu”, namun dari data penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan. Berikut sumber penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Huda (2017) <sup>56</sup>	Deskriptif Kualitatif	1) Prosedur pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT BPR Banda Raya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan unsur pengendalian piutang usaha, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern, disisi lain pengendalian intern piutang sudah cukup baik, akan tetapi keadaan dilapangan banyak terjadi masalah-masalah yang mengakibatkan tunggakan piutang masih ada yang umurnya lebih dari 90 hari. 2) System pengendalian iutang dari	Sama-sama meneliti tentang akuntansi pitutang.	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya. Selain lokasi penilitian juga, terdapat pembeda yaitu aktivitas ekonomi yang dijalankaan.

<sup>56</sup> Saiful Huda dan Mursal, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada PT. BPR Banda Raya Batam*”, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol 11, No. 2, 2017 hal. 96-107

			hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa struktur organisasi, system wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang cakap sudah sesuai.		
2.	Prada (2017) <sup>57</sup>	Deskriptif Kualitatif	<p>1) Prosedur pengendalian intern terhadap piutang usaha pada PT BPR Banda Raya secara keseluruhan sudah berjalan sesuai dengan unsur pengendalian piutang usaha, dimana manajemen perusahaan sudah menerapkan konsep dan prinsip-prinsip pengendalian intern, disisi lain pengendalian intern piutang sudah cukup baik, akan tetapi keadaan dilapangan banyak terjadi masalah-masalah yang mengakibatkan tunggakan piutang masih ada yang umurnya lebih dari 90 hari.</p> <p>2) System pengendalian iutang dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa struktur organisasi, system wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang cakap sudah sesuai.</p>	Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama meneliti tentang akuntansi piutang.	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya. Selain lokasi penilitian juga, terdapat perbedaan yaitu aktivitas ekonomi yang dijalankan.
3.	Ayu (2019) <sup>58</sup>	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian <i>intern</i> piutang yang diterapkan oleh PT. JNE Cabang Medan sudah baik dan efektif dalam meminimalisasi piutang tak tertagih ( <i>bad debt</i> ). Hal ini dapat dilihat dari sistem serta strategi yang digunakan oleh PT. JNE dalam meminimalisasi piutang tak tertagih.	Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern piutang.	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitiannya.
4.	Putra (2016) <sup>59</sup>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui sistem informasi akuntansi	Persamaan penelitian ini	Perbedaanya terletak pada

<sup>57</sup> Kadek Ary Prada dkk, “ *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Koperasi Unit Desa (KUD) Seririt*”, Jurnal Akuntansi, Vol 8, No.2, 2017

<sup>58</sup> Dewi Handika Yani dan Ade Rahma Ayu, “ *Analisisn Pengendalian Intern Piutang dalam Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih pada PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE)mcabang Medan*”, Jurnal Studi Manajemen, Vol. 1, No. 1, 2019 hal.20-24

			<p>penerimaan kas dalam pengendalian internal kas belum efektif dan berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya perangkapan tugas pada bagian kasir yang merangkap pada bagian pembukuan, slip setoran yang belum rangkap, belum bernomor urut, dan pemakaiannya belum berdasarkan pertanggungjawaban petugas. Prosedur yang dijalankan, fungsi yang terkait, dokumen-dokumen, dan catatan akuntansi belum berperan aktif dalam penerimaan kas. Prosedur penerimaan kas merupakan salah satu proses kegiatan operasi yang sangat berpengaruh pada laporan keuangan dan harta milik lembaga. Apabila prosedur yang dijalankan tercatat dan dilaksanakan dengan baik dapat menghindari kekhawatiran adanya suatu pelanggaran atau penyalahgunaan yang tidak terlihat karena kasitu sendiri sangat rawan dan mudah untuk diselewengkan atau dipindah tangankan. Untuk itu, prosedur yang dijalankan dalam penerimaan kas baik melalui kasir maupun petugas dinas lapangan ( PDL ) harus lebih ditingkatkan lagi agar penerimaan kas tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dengan sistem informasi akuntansi yang baik dan pengendalian internal kas yang baik, penerimaan kas baik secara tunai maupun kredit akan sulit untuk disalahgunakan. Maka dari itu, pengawasan terhadap pengendalian internal kas perlu dioptimalkan lagi dimulai dari struktur organisasi maupun sistem otorisasi dan pencatatan agar tujuan lembaga dapat tercapai dan dapat melindungi aset pada lembaga.</p>	<p>dengan skripsi peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern.</p>	<p>lokasi penelitiannya.</p>
5.	Fauziah	Deskriptif	Hasil penelitian menyatakan bahwa	Persamaan	Perbedaannya

<sup>59</sup> Novina Cahyaningsih dan Iwan Setya Putra, "Efektivitas Pengendalian Internal Kas Melalui Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas" Riset Mahasiswa Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2016 hal 167-184

	(2016) <sup>60</sup>	Kualitatif	dalam koperasi sudah ada pemisahan tugas yang memadai antar fungsi. Namun masih terdapat kekurangan yaitu dalam melakukan pengendalian intern semua dokumen yang digunakan dalam transaksi piutang belum ada yang bernomor urut tercetak masih menggunakan formulir yang ditulis tangan manual oleh bagian akuntansi sehingga hal ini sering menimbulkan kesalahan dalam pencatatan piutang. Serta belum ada bagian piutang dan bagian penagihan yang dapat membantu kelancaran operasional koperasi yang menyangkut piutang.	penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, terletak pada objek penelitiannya dan sama-sama meneliti tentang pengendalian akuntansi piutang.	terletak pada lokasi penelitiannya.
6.	Zulkarnain (2017) <sup>61</sup>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyatakan sistem pengendalian internal kas pada koperasi di kecamatan Rambah Hilir dalam kategori belum baik, karena masih terdapat kekurangan dalam sistem pengendaliannya yaitu, masih banyak terdapat rangkap pekerjaan, terdapatnya pengabungan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas, terdapatnya sebagian transaksi tidak menggunakan kwitansi, terdapatnya kelemahan dalam akses kas dan catatan akuntansi, tetapi terdapat kelebihan yaitu pada saat pencairan kredit bendahara koperasi sebagai otorisasi transaksi, terlebih dahulu meminta persetujuan pencairan kredit kepada kepala desa setempat, dan untuk pengambilan kas dibank, didampingi oleh ketua koperasi dengan demikian dari kelebihan tersebut dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam koperasi.	Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, terletak pada objek penelitiannya dan sama-sama meneliti tentang pengendalian akuntansi piutang koperasi.	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya.
7.	Zulfa	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan	Persamaan	Perbedaannya

<sup>60</sup> Yulyana Fauziah, "Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Piutang untuk Mnilai Pengendalian Intern pada Koperasi Wania "Sejahtera" Desa Gayam", Artikel Skripsi 12.1.01.04.0072 2016 hal 10

<sup>61</sup> Zulkarnain, "Analisis Sistem Pegendalian nternal KAs pada Koperasi Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu", Jurnal akuntansi Vol.6, No. 1, 2017

	(2015) <sup>62</sup>	Kualitatif	bahwa secara keseluruhan Pengendalian internal piutang pada koperasi pengembangan usaha (KOPSUS) Sumatera Barat efektif, dimana Manajemen perusahaan harus menerapkan konsep dasar dan prinsip Pengendalian internal.	dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern piutang dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitiannya.
8.	Gultom (2018) <sup>63</sup>	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian intern terhadap piutang harus lebih diterapkan terutama untuk perusahaan dagang, yang memiliki transaksi piutang. Apabila pengendalian intern terhadap piutang tidak diterapkan dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan piutang tak tertagih yang lebih besar di dalam perusahaan. Hal ini berdampak kepada keuangan perusahaan dagang itu sendiri	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern piutang dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.
9.	Tjodi (2017) <sup>64</sup>	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan analisis Pengendalian internal atas piutang usaha pada PT Bank SulutGo KCP Rotana diperoleh bahwa sistem Pengendalian internal atas piutang usaha telah berjalan dengan baik. Manajemen perusahaan telah menerapkan konsep dasar dan prinsip-prinsip Pengendalian internal menurut COSO ( <i>Committee Of Sponsoring Organization</i> ).	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern piutang dan menggunakan metode kualitatif.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.
10.	Lahope	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang	Persamaan	Perbedaannya

<sup>62</sup> Dewi Zulvia, *Analisis Pengendalian Intern Piutang Usaha pada Koperasi Pembangunan Usaha Sumbar*, Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi Vol. 02 No. 01 April 2015, Hal. 8-19

<sup>63</sup> Hamonangan Justinus Gultom, *Pengendalian Intern Terhadap Piutang*, Majalah Ilmiah Politeknik Mandiri Bina Prestasi Vo. 5 No. 1 Mei 2016, Hal. 28-34

<sup>64</sup> Andi Maunjung Tjodi dkk, *Analisis Sistem Penegndalian Internal Piutang Usaha pada PT. Bank SulutGo KCP Ranotana*, Jurnal EMBA Vol. 5 No.2 uni 2017 Hal. 857-866

	(2018) <sup>65</sup>	Kualitatif	dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian intern di koperasi masih kurang efektif, karena belum adanya pembagian tugas atau pemberian wewenang dan tanggung jawab, dan piutang tak tertagih masih sering terjadi di Koperasi Pegawai (KPN) Bahtera Bitung.	dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang pengendalian intern piutang dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitiannya
--	----------------------	------------	---	--	---

---

<sup>65</sup> Wendy Hillari Lahope dkk, *Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Dan Pelunasan Piutang Pada Koperasi Pegawai Negeri KPN Bahtera Bitung*. Jurnal Riset Akuntansi Going concern Vol. 13 No. 3 2018 Hal.489-497